

**KERANGKA ACUAN KERJA  
( K A K )**

**PROGRAM** : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

**KEGIATAN** : PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

**SUB KEGIATAN** : PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**BELANJA SUB KEGIATAN** : BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS

**NOMOR D P A - OPD** : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023

**KODE KEGIATAN** : 1.06.05.1.02.02

**PENGELOLA KEGIATAN** : BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

**LOKASI** : KOTA BUKITTINGGI

**PELAKSANAAN** : MINGGU I (PERTAMA) BULAN MEI 2023

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN

---

PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URAIAN KEGIATAN	:	<b>BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS</b>
PELAKSANA	:	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

### 1. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Dimana *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial"*.

Permasalahan data fakir miskin dan orang tidak mampu saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, salah satu permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak padannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), orang yang sudah meninggal/pindah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan **BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS**. Berdasarkan Permensos R.I Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS, maka DTKS merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga harus dikelola secara baik.

### 3. NAMA KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS**

### 4. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

penyelenggaraan kegiatan **BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** ini untuk memastikan kondisi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang diusulkan ke Kementerian Sosial RI tersebut telah valid berdasarkan hasil pemadanan NIK dengan Dinas Dukcapil masing-masing daerah serta guna mendapatkan data yang mutakhir.

#### b. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan **BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** ini adalah meningkatkan kemampuan petugas pengelola data fakir miskin dan orang tidak mampu benar-benar valid dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga akan mendapatkan data yang baik, akurat dan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS.

## **5. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan adalah para operator / petugas data pada tingkat Nagari/Desa/Kelurahan dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 100 orang.

## **6. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan **BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS** direncanakan di Kota Bukittinggi dengan jumlah Peserta 100 orang untuk 19 Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

## **7. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan **Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi Data BDT/DTKS** direncanakan pada Minggu I (Pertama ) bulan Mei 2023.

## **8. NARASUMBER**

Narasumber direncanakan dari :

- Petugas Pengelola DTKS
- Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

## **9. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN**

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota baik melalui surat maupun secara lisan untuk rencana pelaksanaan kegiatan Bimtek.
- c. Menentukan narasumber, moderator dan panitia penyelenggara.
- d. Menentukan peserta Bimtek.
- e. Membuat silabi/kurikulum untuk materi pelatihan sebagai panduan bagi narasumber.
- f. Membuat surat undangan bagi peserta dan nara sumber.
- g. Melaksanakan pelatihan dan melaporkan kegiatan.

## **10. MATERI**

- Pelaksanaan Verval DTKS Petugas Pengolah DTKS
- Langkah melakukan Verval Pusdatin
- Penekanan pelaksanaan Verval DTKS di Kab/Kota (Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat).

## **11. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan berupa pendekatan andragogi yang dikembangkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang bersifat partisipatif, yaitu berupa :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab

## 12. BIAYA

Seluruh kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DPA-OPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Program Perlindungan dan Jaminan melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan biaya sebesar **Rp.122,974,113-** *(Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah)*

## 14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Sinkronisasi BDT/DTKS ini disusun dengan harapan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, terima kasih.

Padang, Februari 2023  
Rajab 1444 H

Mentgetahui :  
Penggur Anggaran



Arry Yuswardi, S.KM.M.KM  
NIP. 19750810199903 1 006

PPTK



Ir. Yusrizal Chan, M.Kom  
NIP. 19670627 199803 1 004